

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN ALOKASI DANA DARI PUSAT TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI DI YOGYAKARTA TAHUN 2015-2020

Nur Fita Lindrianti✉

Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economic and Business,  
Universitas Diponegoro  
✉nurfita208@gmail.com

### *Abstract*

**Tujuan:** *DI Yogyakarta Province is a province with the highest percentage of poverty in Java. This study aims to analyze the effect of Regional Original Income and Fund Allocation from the Center which consists of General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Revenue Sharing Funds on the poverty level in the Province of DI Yogyakarta in 2015-2020.*

**Metode:** *Based on the data, this research is using panel of data after testing on Eviews 12.0, The most precise analysis is using panel data regression method. This research is using secondary data which consist of The real income profit, general fund, allocation fund, and sharing profit of 5 districts / city in Yogyakarta province 2015 - 2020.*

**Hasil:** *The result of this research is the allocation fund has positive effect on the poverty level, while the Regional Original Revenue, General Allocation Fund and Revenue Sharing Fund had no significant effect on the poverty level.*

**Kata Kunci:** *Poverty, the real income in districts, allocation fund, the special allocation income*

### PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi masalah yang rumit untuk dipecahkan serta menjadi fokus pemerintah dalam setiap agenda tahunannya karena penurunan tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan ekonomi (Setiawan & Prajanti, 2016). Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah kemiskinan. Pembangunan ekonomi yang diharapkan di hampir semua negara yaitu pembangunan yang merata dan adil untuk seluruh lapisan masyarakat di negara tersebut. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata dan adil pemerintah Indonesia mengaktualisasikannya dengan kebijakan otonomi daerah. (Setiyawati & Hamzah, 2007). Berikut merupakan tabel persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2015-2020.

**Tabel 1**  
**Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2015-2020**

Tahun	Persentase Kemiskinan
2015	11.13
2016	10.70
2017	10.12
2018	9.66
2019	9.22
2020	10.19

*Sumber : Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2015-2020, menunjukkan bahwa pada tahun 2015-2020 persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami fluktuasi dan trend nya menurun. Namun dikarenakan adanya wabah virus Covid 19 yang melanda Indonesia pada maret tahun 2020, tingkat persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan menjadi 10.19% pada tahun 2020 dimana untuk tahun sebelumnya sebesar 9.22%. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Permasalahan kemiskinan terjadi hampir di semua daerah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Berikut merupakan tabel persentase penduduk miskin menurut provinsi di Indonesia tahun 2015-2020.

**Tabel 2**  
**Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Tahun 2015 - 2020**

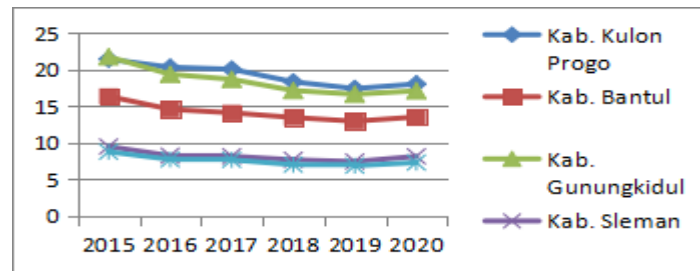
Provinsi	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	RATA - RATA
DKI JAKARTA	3,61	3.75	3.78	3.55	3.42	4.53	3.773
JAWA BARAT	9,57	8.77	7.83	7.25	6.82	7.88	8.02
JAWA TENGAH	13,32	13.19	12.23	11.19	10.58	11.41	11.98
DI YOGYAKARTA	13,16	13.1	12.36	11.81	11.44	12.28	12.35
JAWA TIMUR	12,28	11.85	11.2	10.85	10.2	11.09	11.245
BANTEN	5,75	5.36	5.59	5.25	4.94	5.92	5.46

*Sumber : Badan Pusat Statistik ( diolah)*

Berdasarkan Tabel 2 Persentase penduduk miskin menurut provinsi tahun 2015 - 2020, persentase penduduk miskin di Pulau Jawa masih relatif tinggi terutama di Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar 12.35 persen yang merupakan persentase tertinggi dibandingkan Provinsi lain di Pulau Jawa. Peringkat kedua ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 11.98 persen, peringkat ketiga ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 11.245 persen, peringkat keempat ditempati oleh Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 8.02 persen, peringkat kelima ditempati oleh Provinsi Banten dengan rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 5.46 persen dan yang terakhir ditempati oleh Provinsi DKI

Jakarta dengan rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 3,773 persen.

**Gambar 1**  
**Persentase Penduduk Miskin Provinsi DI Yogyakarta**



*Sumber: BPS Provinsi Yogyakarta (diolah)*

Berdasarkan Gambar 1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2015-2020 menunjukkan bahwa tingkat persentase penduduk miskin mengalami fluktuasi setiap tahunnya dan trendnya menurun. Namun dari tahun 2019-2020 semua kabupaten di Provinsi DI Yogyakarta mengalami peningkatan persentase penduduk miskin. Fenomena ini terjadi dikarenakan adanya pandemi covid 19. Pembatasan mobilitas penduduk dan kegiatan ekonomi masyarakat sebagai upaya menghambat penyebaran Covid-19 berdampak pada melemahnya kegiatan ekonomi. Pada gilirannya kondisi tersebut berakibat pada bertambahnya kemiskinan di D.I. Yogyakarta.

Berdasarkan gambaran kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta yang semakin meningkat maka diperlukan peran pemerintah agar tingkat kemiskinannya menurun salah satunya melalui otonomi daerah. Lahirnya otonomi daerah tentu diikuti juga dengan munculnya desentralisasi fiskal yang mana pemerintah daerah menerima wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan untuk mengatur permasalahan fiskalnya. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan alokasi dana dari pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

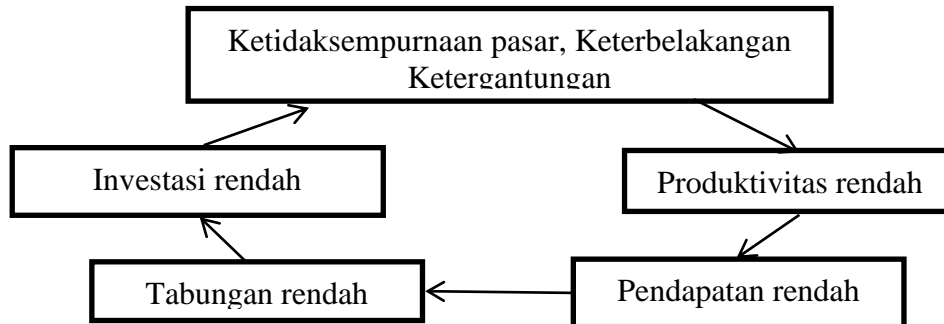
Berdasarkan pada gambaran tersebut maka pemerintah daerah dimungkinkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat melalui dana perimbangan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Hal ini berarti peran pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui kebijakan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil diharapkan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada dengan cara mengalokasikan anggaran yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan permasalahan tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Suryawati (2004) suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (vicious circle of poverty) yang dikemukakan oleh Nurkse (1953), bahwa “a poor country is poor

because it is poor” (negara miskin itu miskin karena memang miskin). Skema lingkaran miskin ini dapat digambarkan pada gambar 1 berikut ini :

**Gambar 2**  
**Lingkaran Setan Kemiskinan (The Vicious Circle of Poverty)**



*Sumber : Mudrajad Kuncoro, 2006*

Faktor penyebab kemiskinan berdasarkan teori Lingkaran Setan Kemiskinan yaitu, pertama secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah, kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produksinya rendah, yang pada gilirannya upah menjadi rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga kemiskinan muncul akibat perbedaan akses ke modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa indikator ekonomi atas keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah Menurut Bastian (2006):

1. Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah riil, sehingga pendapatan per kapita akan terdorong.
2. Terjadi kecenderungan peningkatan investasi, baik investasi asing maupun domestik.
3. Kecenderungan semakin berkembangnya prospek bisnis/usaha di daerah.
4. Adanya kecenderungan meningkatnya kreativitas pemerintah daerah dan masyarakat.

Berlakunya UU No. 25 tahun 1999 dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada Pemerintah daerah. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Disamping itu, Pemerintah Daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan

daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemda (Prakosa, 2004).

Rustiadi et. all (2010), dalam pendapatan asli daerah atau PAD yang meningkat belum menggambarkan pula kenaikan pendapatan masyarakat daerah itu sendiri. Akan tetapi, dengan meningkatnya PAD mampu menjadi kesempatan pemerintah daerah dalam menjadikan faktor sumber daya dalam peningkatan pendapatan masyarakat sehingga nantinya dapat menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut. Serta dengan adanya kebijakan otonomi daerah atau proses pemerintahan dikontrol penuh oleh pemerintah daerah sendiri akan mampu memfokuskan masalah kemiskinan dengan membuat peraturan yang dimana memudahkan investor swasta masuk dan berperan dalam pembangunan ekonomi daerah sehingga nantinya diharapkan adanya keterbukaan lapangan pekerjaan dan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat suatu daerah.

Keterkaitan dana alokasi umum dan kemiskinan sebenarnya sama dengan keterkaitan pendapatan asli daerah dan kemiskinan, dimana DAU memberikan kontribusi terbesar dalam dana perimbangan sehingga DAU dapat membuat kapasitas keuangan masing-masing daerah yang sama melalui implementasi kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan dan potensi daerah dan nantinya hal ini akan memicu pembangunan daerah sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan

Menurut Usman (2008) dalam Lilis Setyo Wati dan Kus Suparwati (2012), dalam kaitannya dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, fungsi dana alokasi khusus hanya menjadi pelengkap atau penambah dari unsur komponen dana perimbangan. Namun dalam perkembangannya, keberadaan DAK menjadi sangat penting bagi pembangunan dalam bentuk DAU pada umumnya hanya mencakupi hanya untuk memenuhi kebutuhan belanja birokrasi. Oleh karena itu, penggunaan dan pemanfaatan DAK di daerah menjadi faktor yang penting dalam keseluruhan program pembangunan nasional pada umumnya. Semakin tinggi DAK maka bantuan pemerintah dalam pemberian layanan kepada masyarakat akan meningkat yang otomatis akan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Wahyuni dan Priyo (2009), menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Besar Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan pada anggaran belanja daerah yang efektif dapat memacu pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang selanjutnya akan menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih tinggi. Pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah-daerah di Indonesia dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah. Diharapkan dengan pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) akan mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada distribusi pendapatan yang berefek pada pengentasan kemiskinan.

Sehingga dari penjelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) diduga berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) diduga berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
4. Dana Bagi Hasil (DBH) diduga berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.
5. PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemiskinan.

## METODE PENELITIAN

### Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional pada penelitian merupakan unsur penelitian yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah. Teori ini dipergunakan sebagai landasan atau alasan mengapa suatu yang bersangkutan memang bisa memengaruhi variabel tak bebas (Supranto, 2003: 322).

Agar definisi dari variabel penelitian dapat dimengerti dan tidak menyebabkan makna ganda dalam pembahasan penelitian ini, maka dijelaskan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan di bawah ini:

1. Kemiskinan  
Menurut Maipita (2014:9), kemiskinan adalah kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar (makanan, pakaian, rumah atau tempat belindung, pendidikan, dan kesehatan) sehingga standar hidup layak tidak tercapai.
2. Pendapatan Asli Daerah  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Rudi, 2011).
3. Dana Alokasi Umum  
Halim (2016: 127) menjelaskan bahwa “Dana alokasi umum adalah transfer dana yang bersifat *block grant*, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah.
4. Dana Alokasi Khusus  
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
5. Dana Bagi Hasil  
Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil diukur dengan satuan rupiah.

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini seluruhnya menggunakan data sekunder. Untuk lebih jelasnya, disajikan rincian jenis dan sumber data yang dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2**  
**Jenis dan Sumber Data**

<b>Jenis Data</b>	<b>Sumber Data</b>
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi DI Yogyakarta	BPS Provinsi DIY
Pendapatan Asli Daerah Provinsi DI Yogyakarta	Bappeda Provinsi DIY
Dana Alokasi Umum Provinsi DI Yogyakarta	Bappeda Provinsi DIY
Dana Alokasi Khusus Provinsi DI Yogyakarta	Bappeda Provinsi DIY
Dana Bagi Hasil Provinsi DI Yogyakarta	Bappeda Provinsi DIY

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang diolah menggunakan *Eviews 12.0*. Data panel atau *pooled data* merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Dengan mengakomodasi informasi baik yang terkait dengan variabel-variabel *cross section* maupun *time series*, data panel secara substansial mampu menurunkan masalah *omitted variable*, kondisi di mana terjadi bias dalam estimasi parameter dalam model akibat dari adanya variabel yang dihilangkan atau tidak dimasukkan (Gujarati&Porter, 2013). Analisis tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), Dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap tingkat kemiskinan.

#### Model Estimasi

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 DBH_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y = Tingkat Kemiskinan di DI Yogyakarta

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DBH = Dana Bagi Hasil

$\alpha$  = intercept

$\beta_1 - \beta_4$  = koefisien regresi variabel independent

$e_{it}$  = Error Term

## HASIL DAN PEMBAHSAN

### Pemilihan Model Terbaik

Tahapan ini dilakukan bertujuan untuk memilih model yang paling tepat antara *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model* dalam melakukan regresi data panel. Dalam menentukan model terbaik pada penelitian ini menggunakan uji *Chow* dan uji *Hausman*. Hasil dari pengujian penentuan model terbaik yang telah dilakukan, maka model regresi yang digunakan untuk melakukan estimasi pengaruh pendapatan asli daerah dan alokasi dana dari pusat terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY tahun 2014-2020 adalah *Fixed Effect Model*.

Penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Alokasi Dana dari Pusat terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2015 - 2020 dengan menggunakan analisis regresi data panel model *fixed effect*. Berdasarkan hasil regresi diperoleh persamaan sebagai berikut.

$$Y_t = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 DBH_{it}$$
$$Y = 107329.4 + 5,21*PAD_{it} - 1,41*DAU_{it} - 7,97*DAK_{it} - 5,44*DBH_{it}$$

Interpretasi dari hasil persamaan diatas adalah sebagai berikut :

1.  $\alpha = 107329.4$ , artinya apabila Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil sebesar 0, maka tingkat kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 107329.4 dengan signifikansi  $\alpha = 5\%$ .
2.  $\beta_1 = 5.21$ , artinya setiap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1% maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 5.21% dengan signifikansi  $\alpha = 5\%$ .
3.  $\beta_2 = - 1.41$ , artinya setiap peningkatan Dana Alokasi Umum sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1.41 % dengan signifikansi  $\alpha = 5\%$ .
4.  $\beta_3 = -7.97$ , artinya setiap peningkatan Dana Alokasi Khusus sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 7.97% dengan signifikansi  $\alpha = 5\%$ .
5.  $\beta_4 = -5.44$ , artinya setiap peningkatan Dana Bagi Hasil sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 5.44% dengan signifikansi  $\alpha = 5\%$ .

Hasil uji regresi linier berganda antara Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,4988. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dibanding signifikansi  $\alpha = 5\%$ . Artinya, pendapatan asli suatu daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Secara teoritis, Pendapatan asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut undang-undang Nomor 33 tahun 2004 pendaptan asli daerah terdiri dari penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Semakin besar jumlah pendapatan suatu daerah maka semakin rendahlah tingkat kemiskinan yang ada pada daerah tersebut, namun ada beberapa hal yang mungkin bisa mengakibatkan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan pada penelitian ini diantaranya yaitu tata kelola pendapatan suatu daerah itu yang mungkin belum tepat sasaran sehingga pendapatan asli daerah belum bisa menurunkan tingkat kemiskinan pada suatu daerah.

Hasil uji regresi linier berganda antara Dana Alokasi Umum terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,8381. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dibanding signifikansi  $\alpha = 5\%$  yang artinya, dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta. Hasil menunjukkan slope positif, apabila dana alokasi umum meningkat kemiskinan akan meningkat dan sebaliknya ceteris paribus. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan negatif antara dana alokasi umum dan kemiskinan. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pusat yang diharapkan digunakan untuk program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dimana jika pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat artinya pendapatan masyarakat juga meningkat dan kemampuan



masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok atau sehari-hari tercukupi dan angka kemiskinan secara agregat menurun.

Hasil uji regresi linier berganda antara Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,0058. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dibanding signifikansi  $\alpha = 5\%$  yang artinya, dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penerimaan DAK tiap daerah maka semakin menurun tingkat kemiskinan di DIY. Dan sebaliknya jika penerimaan DAK rendah, maka kemiskinan di daerah tersebut akan meningkat. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Basyir *et al* (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “*Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Aceh*”. Hasil pengujian menyatakan bahwa secara parsial hanya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Hasil uji regresi linier berganda antara Dana Bagi Hasil terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,0934. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dibanding signifikansi  $\alpha = 5\%$  yang artinya, dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 20). Penjelasan Umum Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengandung pengertian bahwa pengalokasian Dana Bagi Hasil pada APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam. Menurut Bird dan Vaillancourt (2000:42), banyak Negara menggunakan system bagi hasil pajak dengan mendistribusikan suatu persentase tetap pajak-pajak nasional tertentu, misalnya pajak pendapatan atau pajak pertambahan nilai ke pemerintah daerah.

Hasil uji regresi linier berganda antara PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.0000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dibanding signifikansi  $\alpha = 5\%$  yang artinya, PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Pratomo (2015) yang berjudul “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di DKI Jakarta*” dengan hasil penelitian bahwa PAD, DAU, DBH secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat diambil beberapa simpulan yaitu sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Artinya, jika pendapatan asli daerah meningkat tidak akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta.
2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Dana Alokasi Umum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta dengan taraf signifikansi

sebesar 5%. Artinya, jika dana alokasi umum meningkat tidak akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta.

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Artinya, jika dana alokasi khusus meningkat maka tingkat kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta juga akan meningkat.
4. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Dana Bagi Hasil terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Artinya, jika dana bagi hasil meningkat tidak akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta.
5. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara bersama - sama (simultan) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta. Nilai koefisien determinasi sebesar 0.506 menunjukkan bahwa variabel dependen dan independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel terikat sebesar 98.3% dan sisanya 1.7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- :
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DI Yogyakarta. *Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021*. Diakses pada 17 Juni 2021 Pukul 15:08 , [http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/pencarian\\_data/index](http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/pencarian_data/index).
- . 2021. *Dana Alokasi Umum Tahun 2017-2021*. [http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/pencarian\\_data/index](http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/pencarian_data/index) diakses pada 17 Juni 2021 Pukul 15:40
- . 2021. *Dana Alokasi Khusus Tahun 2017-2021*. [http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/pencarian\\_data/index](http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/pencarian_data/index) diakses pada 17 Juni 2021 Pukul 16:00
- . 2021. *Dana Bagi Hasil Tahun 2017-2021*. [http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/pencarian\\_data/index](http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/pencarian_data/index) diakses pada 17 Juni 2021 Pukul 16:30
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Gujarati. D.N dan Dawn C. Porter. 2013. *Dasar-dasar Ekonometrika Buku 2 : Edisi 5*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2007). "Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah". Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Maipita, Indra. (2014). *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Prakosa. (2004). "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah, Studi di wilayah Provinsi Jateng dan DIY". *JAAL*. Vol 8, No 2, Hal 101-118.
- Rudy Badrudin. (2011). *Ekonomi Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN Yogyakarta. Hal.99.
- Rustiadi, Ernan et al. (2010). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Nurkse, Ragnar. (1953). *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. New York: Oxford University Press.

- Setiawan, A. B., & Prajanti, S. D. W. (2016). Journal of Indonesian applied economics. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 6(2), 176–190.  
<http://jiae.ub.ac.id/index.php/jiae/article/view/183/165>
- Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. (2012). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja pendidikan dan Kesehatan sebagai variabel intervening”. Vol. 9 No.1. Hal 113-133.
- Suryawati. (2004). Teori Ekonomi Mikro. AMP YKPN, Yogyakarta.
- Supranto, J. (2003). *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran*. Edisi Revisi Ketujuh. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Wahyuni dan Priyo Hari Adi. (2009). *Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Se Jawa Bali)*. National Conference UKWMS Surabaya.